

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang – Undang Dasar Negara Indonesia telah mengamanatkan tentang upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini menunjukan bahwa setiap warga negara usia mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi harus mengeyam pendidikan. Salah Satu nya Sekolah swasta merupakan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat atau yayasan yang berbadan hukum.

Dalam pelaksanaannya sekolah swasta tidak terlepas dari Pembiayaan pendidikan merupakan suatu konsep yang seharusnya ada dan tidak dapat dipahami tanpa mengkaji konsep-konsep yang mendasarinya. Ada anggapan bahwa pembicaraan pembiayaan pendidikan tidak lepas dari persoalan ekonomi pendidikan. Johns dan Morphet (1970:85) Mengemukakan bahwa “pendidikan itu mempunyai peranan vital terhadap ekonomi dan negara modern. Dikemukakan hasil penelitian akhir -akhir ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan *a major contributor* terhadap pertumbuhan ekonomi”. Secara umum pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas, yang didalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponen, yang memiliki rentang yang bersifat mikro (satuan pendidikan) hingga yang makro (nasional), yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasianya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya, akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya sekolah, dan permasalahan-permasalahan yang masih terkait dengan pembiayaan pendidikan.

Namun, dibalik pentingnya pendidikan tersebut ada sebuah kendala besar yang membuat pendidikan susah untuk ditempuh, yaitu besarnya biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh peserta didik yang dikenal dengan *Sumbangan Pembinaan Pendidikan*.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkapkan data angka anak putus sekolah di indonesia tahun 2019, sepanjang tahun itu sekitar 4,3 juta siswa di indonesia putus sekolah di berbagai jenjang.

Potensi terbesar anak putus sekolah berapa pada usia 15-16 tahun. siswa di rentang usia tersebut merupakan peserta didik lulus SMP dan akan melanjutkan ke tingkat SMA. separuh dari 4,3 juta siswa putus sekolah tersebut berada di provinsi Jawa Barat

Sekolah swasta berbentuk independen artinya dalam penyelenggaraannya sekolah tersebut tidaklah dikelola oleh pemerintah daerah, ataupun nasional seperti sekolah negeri. Pendirian sekolah swasta didirikan atas nama perorangan, kelompok atau

yayasan yang dilatarbelakangi tujuan yang beragam baik keagamaan, kebudayaan ataupun kedaerahan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan untuk kelangsungan proses belajar mengajar. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik itu disadari maupun yang tidak disadari. Pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan serta tercapainya kefisienan dan kefektifan dalam proses pendidikan. Berkaitan dengan penerimaan keuangan dari orang tua dan masyarakat ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 1989 bahwa karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan, tanggung jawab atas pemenuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua. Sumbangan Pembinaan Pendidikan merupakan kewajiban yang dibayar per periode oleh peserta didik.

Sekolah swasta yang dimiliki oleh yayasan biasanya bertujuan sosial, karena tidak memungut biaya yang memberatkan murid yang ekonomi keluarganya kurang mampu, supaya tetap bisa bersekolah. berdasarkan survey yang di lakukan pihak sekolah dalam 3 tahun belakangan terdapat beberapa orang tua siswa atau wali murid yang mempunyai kekurangan ekonomi dalam hal ini pihak sekolah mengambil tindakan agar siswa/ warga di dekat sekolah yang memiliki kekurangan kemampuan ekonomi yang lemah dapat melanjutkan pendidikan yang layak.

Bantuan diberikan kepada peserta didik yang memenuhi kriteria atau bobot yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Kriteria atau bobot yang di tentukan berdasarkan banyak pilihan, dengan kondisi keuangan orang tua, jumlah saudara, status sosial, prestasi akademik, prestasi non akademik, pemegang kartu KIP, Keluarga tidak mampu(SKTM).

Sehubung dengan pentingnya pemberian pembebasan pembayaran bagi penerima / peserta didik dan belum adanya alat bantu atau metode yang digunakan untuk menentukan penerima pembebasan pembayaran, maka dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu pembuatan keputusan dalam mementukan penerima pembebasan pembayaran tersebut. untuk menentukan penerima pembebasan pembayaran.

Adapun metode Simple Additive Weigthing (SAW) yang pernah di pakai oleh jurnal rujukan yaitu menurut Dedi Irawan (2016) yang berjudul Analisis Sistem Pendukung Keputusan untuk pemberian keputusan Pembebasan Biaya bagi siswa yang kurang mampu menggunakan metode simple additive weighting (SAW) (Study Kasus MI Hidayatuul Mubtadiin Srikaton Adiluwih. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun adalah pada jumlah dan jenis kriterianya.

Maka digunakan metode *Sistem pendukung keputusan* adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer termasuk sistem berbasis pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan dan *Simple Additive Weighting (SAW)*, SAW adalah merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjut dengan perangkingan yang akan menyeleksi alternatif siapa penerima pembebasan pembayaran. Dengan metode ini yang didasarkan bobot yang sudah ditentukan agar lebih baik berdasarkan kriteria – kriteria sehingga mendapatkan hasil yang tepat terhadap siapa yang akan menjadi penerima pembebasan biaya tersebut berdasarkan latar belakang di atas, maka dari itu mengambil judul “ **Penerapan Metode Simple Additive Weighting (SAW) Untuk Menentukan Pemberian Pembebasan Biaya bagi Siswa yang Kurang Mampu di Sekolah Menengah Kejuruan** ”

B. RUMUSAN MASALAH

Proses pemberian Pembebasan biaya berjalan sesuai seleksi yang dilakukan oleh pihak sekolah masih manual, dalam hal ini bagian tata usaha memberikan informasi kepada siswa-siswi yang ingin mengajukan permohonan bantuan pembebasan pembayaran berdasarkan kriteria – kriteria yang sudah ditentukan untuk mendapatkan bantuan pembebasan pembayaran, proses pengecekan tersebut membutuhkan waktu untuk menjadi hasil dan di sampaikan kepada pihak yayasan, setelah di proses data hasilnya di berikan kepada pihak yayasan bahwa daftar penerima bantuan tersebut memenuhi kriteria atau tidak, namun pihak yayasan tidak mengetahui alasan ketika data penerima tersebut memenuhi kriteria atau tidak, Berikut adalah data penerima pembebasan biaya tahun 2019.

1. Identifikasi Masalah

Tabel 1.1 Data Penerima Bantuan Tahun 2019

NO	NAMA	Penghasilan Ortu	Status Sosial	Prestasi Akademik	Ekskul	Tanggungan Ortu	KIP	SKTM	*Penerima
1	FAZRIANSYAH FATHA NASRULLAH	2.000.000	Tidak	Ranking 5	2	2	Tidak	Ya	Tidak
2	MUHAMMAD FATHAN MUBINA	500.000	Yatim	Ranking 1	1	3	Tidak	Ya	Tidak
3	RIO FEBRIANSYAH	1.000.000	Tidak	Ranking 3	1	3	Tidak	Ya	Tidak
4	ZIA LINANDI ALZAHRA	2.000.000	Tidak	Ranking 2	3	3	Tidak	Tidak	*Ya
5	IRGI	1.000.000	Tidak	Ranking 3	1	3	Ya	Tidak	Tidak

6	ILHAM MAULANA	500.000	Yatim	Ranking 5	0	2	Tidak	Tidak	Tidak
7	REZKY PERMANA PUTRA	1.500.000	Tidak	Ranking 5	0	1	Tidak	Tidak	Tidak
8	LUTFY REZA ADIWINATA	1.000.000	Tidak	Ranking 4	0	3	Tidak	Ya	Tidak
9	IKMAL MAULANA RIZKI	2.000.000	Tidak	Ranking 4	1	2	Tidak	Tidak	Tidak
10	RAMDAN SAPRUDIN	1.000.000	Tidak	Ranking 1	1	3	Tidak	Ya	*Ya
11	HERI BAGUS TRIYONO	1.000.000	Yatim	Ranking 5	0	3	Ya	Tidak	Tidak

Dilihat dari tabel 1.1 Dalam pelaksanaannya masih terdapat data hasil yang tidak tepat dalam penerima bantuan, dimana data hasil tersebut seolah hanya berdasarkan dari spekulasi dan relasi keterkaitan antara bagian kesiswaan dengan siswa yang mendapat bantuan tersebut, sehingga perlunya sistem yang digunakan dalam menentukan pemberian bantuan agar hal ini tidak terjadi kejadian serupa kedepannya.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini identifikasi masalah.

- a. Belum tepat dalam menentukan calon penerima bantuan pembebasan biaya pembayaran
- b. Belum efektif di dalam proses menentukan calon penerima bantuan pembebasan biaya pembayaran.

2. Perumusan Masalah

a. Problem Statement

Belum tepat dan efektif di dalam menentukan calon penerima bantuan pembebasan biaya Pembayaran yang belum tepat.

b. Research Question

- 1) Bagaimana penerapan metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk menentukan penerima bantuan pembebasan biaya pembayaran ?
- 2) Seberapa tepat dan efektif penerapan metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk menentukan penerima bantuan pembebasan biaya pembayaran?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud dari Penelitian ini adalah

Menerapkan Metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk menentukan penerima bantuan pembebasan biaya pembayaran yang tepat sasaran berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

2. Tujuan

- a. Untuk mendapatkan calon penerima bantuan pembebasan biaya pembayaran yang tepat
- b. Mendapatkan proses penentuan calon penerima bantuan pembebasan biaya pembayaran yang lebih efektif
- c. Mengembangkan prototype aplikasi penentuan calon penerima bantuan pembebasan biaya pembayaran dengan pendekatan Metode Simple Additive Weighting (SAW)
- d. Mengukur tingkat ketepatan dan efektifitas dalam menentukan penerima bantuan pembebasan biaya pembayaran dengan pendekatan Simple Additive Weighting (SAW)

D. Spesifikasi Hasil yang di harapkan

Dengan dilakukan nya penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak sekolah dalam menyeleksi penerima bantuan pembebasan biaya yang tepat sasaran dalam bentuk prototype aplikasi yang meliputi:

1. Aplikasi yang dapat digunakan pihak sekolah yang user friendly
2. Infromasi data calon penerima bantuan pembebasan biaya yang lebih cepat.
3. Dengan adanya sistem tersebut dapat memberikan data yang akurat
4. Sistem pengoprasian dengan teknik komputasi.

E. Signifikasi Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Menerapkan metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk menentukan calon penerima pembebasan biaya pembayaran yang tepat.

2. Mengembangkan teknik Komputing pemodelan Simple Additive Weighting (SAW) untuk menentukan calon penerima pembebasan biaya pembayaran yang tepat.
3. Agar dapat menjadi acuan dalam menentukan calon penerima bantuan pembebasan biaya pembayaran kedepannya.

F. Asumsi dan Keterbatasan

1. Asumsi

Penentuan Penerima bantuan Pembebasan Biaya Pembayaran masih menggunakan sistem gambling dan tunjuk untuk memperoleh data calon penerima bantuan pembebasan biaya pembayaran. Berdasarkan asumsi diatas, metode yang digunakan sesuai permasalah tersebut yaitu, Metode perhitungan Simple Additive Weighting (SAW).

2. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu:

- a. Data – Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data penerima pembebasan biaya pembayaran.
- b. Sistem Pendukung Keputusan ini Khusus digunakan untuk proses penseleksian penerima bantuan pembebasan biaya pembayaran.
- c. Hanya menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW)

G. Definisi Istilah dan Definisi Operasional

1. Sekolah Swasta

Sekolah Swasta juga disebut sebagai sekolah independen, tidak dikelola oleh pemerintah daerah, negara bagian atau nasional. Mereka memperoleh hak untuk menyeleksi siswa dan didanai seluruhnya atau sebagian dengan membebankan biaya sekolah kepada siswa,

2. Pemberian Pembebasan Biaya

Pemberian Pembebasan biaya ini diberikan oleh pihak yayasan setia tahunnya sebagai salah satu program dalam mendukung pemerintah bagi siswa yang kurang mampu agar tetap mendapatkan pendidikan yang layak.

3. Siswa

siswa penerima bantuan merupakan hal pertama yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu dengan mengumpulkan data secara objektif

4. Algoritma SAW

adalah Salah satu algoritma yang digunakan untuk pengambil keputusan. SAW juga dikenal dengan algoritma dengan metode penjumlahan berbobot.